

Islam Dan Demokrasi: Prespektif Cendekiawan Muslim dan Penerapan di Indonesia

Solihin

STAI Miftahul Ula Nganjuk
Email: solihin6979@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan dari artikel ini adalah bagaimana konsep demokrasi menurut pendapat cendekiawan muslim, serta bagaimana respon dan penerapan demokrasi di tanah air Indonesia. Bahwa antara demokrasi dan *syura* banyak sekali titik persamaannya meskipun juga ada beberapa celah perbedaannya. Namun demikian pemikiran yang bijak haruslah menjadi acuan dan pegangan, baik dalam melihat permasalahan demokrasi atau pun yang lainnya. Untuk kasus umat Islam Indonesia berdasarkan penelitian, dapat dikatakan bahwa umat Islam Indonesia begitu menerima dan berhubungan positif dengan konsep demokrasi yang dianggap hasil menafsiran ilmuwan barat, hal ini mengingat dalam praktiknya demokrasi di Indonesia telah diadaptifkan dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Demokrasi, cendekiawan, konsep kenegaraan.

ABSTRACT

The purpose of this article is how the concept of democracy in the opinion of Muslim scholars, and how the response and implementation of democracy in Indonesia. That there are many similarities between democracy and shura, although there are also some differences. However, wise thinking must be a reference and guide, both in looking at problems of democracy or others. For the case of Indonesian Muslims based on research, it can be said that Indonesian Muslims are very accepting and positively related to the concept of democracy which is considered the result of the interpretation of western scientists, considering that in practice democracy in Indonesia has been adapted to Islamic values. Keywords: Democracy, intellectuals, the concept of state.

Keywords: Religion, Tolerance, Multicultural.

A. Pendahuluan

Demokrasi dapat dikatakan salah satu tema yang sampai saat ini masih menarik untuk didiskusikan. Hal ini terlihat dari banyaknya karya yang mengulas terkait demokrasi, baik akademisi maupun praktisi. baik itu oleh para pemikir Islam maupun Barat. Semenjak kedatangan bangsa Barat ke dunia Islam, dan seiring dengan kemajuan bangsa Barat saat ini, maka sesuatu yang datang dari Barat selalu dijadikan indikator simbol kemajuan. Atas klaim itu sehingga banyak negara merasa penting untuk “mencontoh” baik secara langsung atau tidak segala bentuk kemajuan yang pernah dicapai oleh Barat termasuk di dalamnya tema demokrasi.

Di kalangan para intelektual Islam terdapat perbedaan pandangan dalam menanggapi permasalahan demokrasi.

Banyak cendekiawan merumuskan, bahwa unsur pokok suatu peradaban (*civilization*) adalah agama, di mana agama adalah faktor terpenting dalam menentukan karakteristik suatu peradaban, sebab itu Bernard Lewis, menyebutkan peradaban Barat dengan sebutan *Chirstian Civilation*, dengan unsur utama agama Kristen. Samuel P. Huntington juga menulis, “Agama adalah karakteristik sentral yang menentukan dalam peradaban”. Diantara empat peradaban besar yang masih eksis- Islam, Barat, India dan Cina, menurut Hutington, terkait dengan agama Islam, Kristen, Hindu dan Konghucu¹. Begitu juga dengan negara Indonesia, yang peradabannya dipengaruhi oleh Agama Islam, sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia lahir dari semangat para Ulama untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajah.²

Apakah konsep demokrasi yang merupakan warisan negara Barat, dapat diadaptasi dengan kultur dan budaya Indonesia, di mana Indonesia yang bukan negara Islam, namun mayoritas penduduknya adalah muslim, sehingga sistem kenegaraan termasuk demokrasi harus tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu bagaimana demokrasi dalam Islam prespektif Intelektual muslim serta penerapannya di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Sekilas Tentang Demokrasi

Istilah Demokrasi pertama sekali diperkenalkan oleh Herodotus sekitar 3000 tahun yang lalu di Mesir Kuno, kemudian dikembangkan oleh para pemikir Yunani Kuno pada masa klasik³. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari kata *Demos* (rakyat) dan *Kratos* (kekuasaan/pemerintahan), dari bahasa Yunani. Dalam sejarah, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke-5 SM, yang merupakan respon terhadap pengalaman buruk sistem monarkhi dan kediktatoran di negara-negara kota Athena (Yunani Kuno). Ketika itu demokrasi dipraktikkan sebagai sistem dimana seluruh warga negara membentuk lembaga legislatif. Hal ini dimungkinkan oleh kenyataan jumlah penduduk negara-negara kota kurang lebih sepuluh ribu jiwa dan bahwa wanita, anak kecil serta para budak tidak mempunyai hak politik. Tidak ada pemisahan kekuasaan ketika itu dan semua pejabat bertanggung jawab sepenuhnya pada

¹ Adian Husaini, *Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolis me Intelektual*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 21.

² Aan Nasrullah, *Ekonomi Politik Islam: Pemikiran, Pergerakan Dan Perkembangan Nya Di Indonesia*, Ahkam, Volume 6, Nomor 1, Juli 2018: 125-148. Diakses melalui: <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2470>

³ Afan Gaffar, 1995:347

Majelis Rakyat yang memenuhi syarat untuk mengontrol berbagai persoalan eksekutif, yudikatif dan legislatif⁴.

Sekarang, “*term*” demokarasi hampir diterima oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini, bahkan pemerintah otoriter pun menerima istilah “demokrasi” untuk mengkarakterisasikan rezim dan aspirasi mereka. Demokrasi memang merupakan slogan wacana politik kontemporer. Akibatnya adalah meluasnya pengertian demokrasi itu sendiri, seperti Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Kerakyatan, Demokrasi Sosialis, dan lainlain. Oleh karena itu, istilah demokrasi mempunyai berbagai pengertian, di antaranya yaitu: *Pertama*, definisi yang diberikan oleh Joseph A. Schumpeter, menurutnya metode demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. *Kedua*, definisi yang diberikan oleh Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan ini secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dari pengertian demokrasi diatas, maka demokrasi mengandung unsur-unsur: kekuasaan mayoritas, suara rakyat, pemilihan yang bebas dan bertanggung jawab.

2. Demokrasi dan Agama Islam dalam Pandangan Intelektual

Ketika berbicara tentang hubungan antara agama (dalam hal ini Islam) dengan demokrasi, menurut Komaruddin Hidayat, ada tiga model yang harus diperhatikan, yaitu: hubungan yang bersifat negatif, netral, dan positif. Hubungan yang pertama diistilahkan dengan “Agama Versus demokrasi”; hubungan kedua diistilahkan dengan “Sekularisasi Politik”; dan yang ketiga diistilahkan dengan “Teo-Demokrasi”⁵. Penjelasan singkat dari ketiganya adalah: *pertama*, Agama versus Demokrasi, di mana agama dan demokrasi tidak dapat disatukan atau dipertemukan, dan bahkan berlawanan. Agama berciri konserfatif dan membelunggu penalaran dan kemerdekaan manusia untuk membangun dunianya secara otonom, tanpa dikekang oleh tangan Tuhan yang hadir melalui kekuasaan lembaga dan penguasa agama.

Kedua, Sekularisasi Politik, dalam model ini, hubungan agama dan demokrasi adalah bersifat netral, yaitu: urusan agama dan urusan politik berjalan sendiri. Sekularisasi tersebut bisa terjadi pada level formal kelembagaan, pada proses sosial, bisa juga pada level kesadaran metafisis, dan bisa jadi pada ketiga level tersebut terjadi sekaligus. Ciri pokok pada kehidupan sekular adalah penekanannya pada prinsip rasionalitas dan efisiensi yang diberlakukan dalam

⁴ A. Rahman Zainuddin, 2001: 14

⁵ Komaruddin Hidayat, 1998:9-18

bidang kehidupan yang faktual empiris, sehingga agama semakin tersisih menjadi urusan pribadi. *Ketiga*, Teo-Demokrasi, di mana pada model ini, baik secara teologis maupun sosiologis, sangat mendukung proses demokrasi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Karena semua agama dari tradisi Ibrahim muncul dan berkembang dengan misi untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat manusia. Oleh karena itu, meskipun agama tidak secara sistemis mengajarkan praktek demokrasi, namun agama memberikan etos, spirit dan muatan doktrinal yang mendorong bagi terwujudnya kehidupan demokratis.

Menurut Fahmi Huwaidi, demokrasi adalah sangat dekat dengan Islam dan substansinya sejalan dengan Islam. Argumentasi yang dihadirkan oleh Fahmi Huwaidi adalah; *Pertama*, beberapa hadits menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. *Kedua*, penolakan Islam kepada kediktatoran. *Ketiga*, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja seperti yang diperintahkan Alquran. *Keempat*, demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhilafahan *Khulafa al-Rashidin* yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan. *Kelima*, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. *Kelima*, suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan, kekufuran dan ketidaksyukuran. *Keenam*, legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan⁶

Pembahasan demokrasi dalam kalangan muslim, selalu dikaitkan dengan *syura* (musyawarah), sebagian cendekiawan muslim memandang demokrasi dan *Syura* adalah dua hal yang identik akan tetapi terdapat juga perbedaan. Di antara cendekiawan Muslim yang beranggapan seperti adalah Imam Khomeini. Ia mengatakan bahwa di satu sisi Iran menganggap bahwa Tuhan sebagai penguasa mutlak yang semua perintah-Nya harus diikuti, sedangkan di sisi lain sebagai negara republik, Iran memandang perlunya partisipasi rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti lewat pemilu untuk memilih wakil mereka di parlemen, pemilu presiden.

Cendekiawan Muslim lainnya Taufiq al-Syawi mengatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk *syura* versi Eropa. Meskipun begitu, demokrasi tidak sama dengan *syura*, karena tidak berpegang pada dasar syariat Islam. Menurutnya demokrasi konvensional sangat rentan terhadap perilaku diktator, karena demokrasi memungkinkan penguasa melakukan upaya tertentu merebut dan mempengaruhi kekuasaan legislatif, lalu menciptakan undang-undang tersendiri yang berfungsi untuk memperluas kekuasaannya. Dengan begitu ia menegaskan bahwa sistem *syura* sebenarnya telah melangkah lebih maju ketimbang sistem

⁶ Fahmi Huwaidi, 1996:193

demokrasi modern, karena sistem *syura*, mewajibkan para penguasa berpegang pada syariat atau sumber samawi yang lebih tinggi dari penguasa yang tidak memungkinkan mereka mencampurinya, sekalipun pada persoalan yang tidak dijelaskan secara pasti, karena itu wewenang ulama⁷.

Ulama lain, Yusuf Al-Qardhawy, ia mengatakan bahwa secara substansi, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan ajaran substansi demokrasi telah lama dikenal oleh Islam.¹⁹ Meskipun substansi demokrasi sudah dikenal oleh Islam, akan tetapi rinciannya diserahkan kepada ijtihad orang-orang Muslim, sesuai dengan dasar-dasar agamanya, kemaslahatan dunianya, perkembangan hidupnya menurut pertimbangan tempat dan waktu serta trend kehidupan manusia.

Sedangkan menurut cendekiawan muslim Indonesia, yakni Amin Rais memandang bahwa ia tidak melihat adanya pertentangan antara Islam (*musyawarah*) dengan demokrasi. Hanya saja menurutnya istilah demokrasi dewasa ini telah disalahpahami menurut kepentingan politik rezim yang berkuasa. Lebih lanjut ia mengutarakan tiga alasan penerimaannya terhadap konsep demokrasi; *pertama*, secara konsep dasar, Alquran memerintahkan umat Islam agar melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. *Kedua*, secara historis, Nabi mempraktekkan musyawarah dengan para sahabat. *Ketiga*, secara rasional, umat Islam diperintahkan untuk menyelesaikan dilema dan masalah-masalah mereka.

3. Hubungan Islam dan Demokrasi: Kasus Indonesia

Sejak zaman pergerakan Islam adalah kekuatan demokrasi yang konsisten. Gagasan demokrasi berkembang di kalangan para pemimpin ummat Islam dan diperjuangkan secara konkrit dalam pemerintahan sejak awal kemerdekaan⁸. Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian Saiful Mujani melalui riset disertasinya. Hasil penelitiannya merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa Islam atau masyarakat Islam tak sesuai dengan demokrasi atau tak akan bisa menerima konsep penerapan demokrasi⁹.

Dalam penelitiannya Saeful Mujani menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada satu pun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan satu unsur demokrasi. Keseluruhan proposisi bahwa Islam memiliki korelasi negatif dengan demokrasi jika mengacu pada hasil survei kaum Muslim Indonesia terbantahkan. Berdasarkan data ini, maka pendapat mereka yang menyatakan bahwa Islam mempunyai korelasi negatif dengan demokrasi dengan mengacu pada pandangan kaum Muslim Indonesia terbantah atau secara otomatis gugur.

⁷ Taufiq Al-Syawi, 1997:21-23

⁸ Rozihan, 2022

⁹ Saiful Mujani, 2007

C. Kesimpulan

Dapat diambil kesimpulan bahwa antara demokrasi dan syura banyak sekali titik persamaannya meskipun juga ada beberapa celah perbedaannya. Namun demikian pemikiran yang bijak haruslah menjadi acuan dan pegangan, baik dalam melihat permasalahan demokrasi atau pun yang lainnya. Untuk kasus umat Islam Indonesia berdasarkan penelitian, dapat dikatakan bahwa umat Islam Indonesia begitu menerima dan berhubungan positif dengan konsep demokrasi yang dianggap hasil menafsiran ilmuwan barat, hal ini mengingat dalam praktiknya demokrasi di Indonesia telah diadaptifkan dengan nilai-nilai Islam.

Referensi.

- Al-Syawi, Taufiq. *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin ZS. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Hidayat, Komaruddin. *Tragedi Raja midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Huwaiti, Fahmi. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terj. M. Abdul Ghofar. Bandung: Mizan, 1996.
- Kamil, Sukron. *Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997. Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Nafis, Muhammad Wahyuni, dkk. *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Robert A. Dahl. *Dilemma of Pluralist Democracy*. New Haven dan London: Yale University Press, 1982.
- Rozihan. *Peradaban Islam Indonesia. Modul kuliah Magister Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- The New Encyclopaedia Britannica, vol. 4, Micropaedia, Ready Reference, Encyclopedia Britannia Inc. Chicago: University of Chicago Press, 1988.